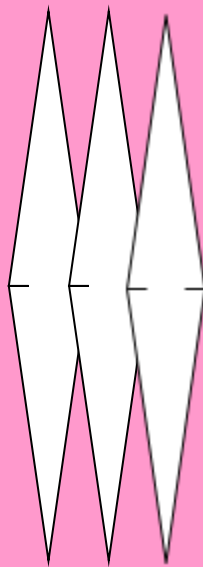


RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2019





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Pahlawan No. 136, Telp/Fax. (0287) 385912 Kebumen

PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 050.24/4365

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

Pasal 1

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

4
Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Agustus 2018

KEPALA DPMPSTP
KABUPATEN KEBUMEN



HERY SETYANTO

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
4. Inspektur Kabupaten Kebumen

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2019 memuat program, kegiatan, lokasi, fungsi dan sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dilakukan pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan hasil forum perangkat daerah dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 merupakan ;

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian tersebut dikaitkan dengan isu-isu pentingnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup diantaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2017 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud, dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD, Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus mengalami peningkatan, adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Semakin optimalnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan (Masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta), dalam proses perencanaan;
2. Semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dan sistem perencanaan;
3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bap3da dan narasumber yang kompeten;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017, dan realisasi renstra PMPTSP Tahun 2016-2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi									
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Strategis Antara Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen	25	20	20	20	100	20	60	2
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Tersedianya bahan-bahan promosi untuk pengembangan modal berupa studi/penelitian), Penyebaran informasi	2	2	2	2	100	2	6	3

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		profil investasi								
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal berupa : Temu Usaha/ Machmaking, Kebumen Business Forum, Penganugeraan Usaha Terbaik	3	2	3	3	100	3	8	3
	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Tersedianya dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan	2	2	2	2	100	2	6	3
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal terhadap perusahaan	30	30	30	30	100	30	90	3

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya pameran investasi	4	3	4	4	100	4	11	3
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan berupa pembinaan LKPM Online, klinik LKPM dan Task Force Penanaman Modal	20	20	20	20	100	20	60	3
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu		81,25	80,75	80,75	73,34	90	81,00		
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan									
	Penyusunan Profil dan Pedoman Teknis Pengelolaan Sumber Daya Mineral	Tersedianya informasi tentang energi dan Tersedianya informasi tentang sumber daya mineral	1	-	-	-	0	1	1	1

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri									
	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Terlaksananya koordinasi pemantauan dan evaluasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO);	6	6	6	6	100	6	18	3
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan;	26	26	26	26	100	26	78	3
		Terlaksananya rapat koordinasi pembahasan dan verifikasi lapangan terkait dengan permohonan izin	1100	1100	850	850	100	950	2900	3
	Peningkatan Pelayanan Perijinan	Meningkatnya pelayanan perizinan;	11	11	11	11	100	11	33	3
		Tercukupinya akurasi data perizinan	40	30	30	30	100	35	95	2

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah									
	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil & menengah	Terlayannya perizinan sesuai dengan SPP dan SOP	3200	2854	2854	5000	100	2900	10754	3
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyediaan surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya listrik, air, telepon dan internet	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)	12	12	12	12	100	12	36	3

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan (orang)	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya sarana kebersihan	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terealisasinya perbaikan peralatan kerja	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan Per-UU-an	12	12	12	12	100	12	36	3

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	12	12	12	12	100	12	36	3
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas keluar daerah	12	12	12	12	100	12	36	3
	Penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya Pegawai Tidak Tetap	12	12	12	12	100	12	36	3
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	12	12	12	100	12	36	3
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	3	0	0	100	5	8	4
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1	1	1	1	100	2	4	3
	Pemeliharaan rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan gedung	1	1	1	1	100	1	3	3

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	perlengkapan gedung kantor	kantor								
	Program Pengembangan data/Informasi									
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan : Renja, Renstra, Lakip, LKPJ, LPPD, Rakor Pop/K, Monev dan laporan bulanan lain (dokumen)	6	7	7	6	100	6	13	2
	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan		1	1	1	1	100	1	3	3

Sumber : LKJIP DPMPTSP, 2017 (data diolah)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan tersebut Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017 telah melaksanakan 7 Program dan 28 Kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Capaian Kinerja Program, dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 100%, dimana targetnya 100% tercapai 102 %

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi		Terwujudnya Fasilitas Kerjasama Strategis Antara Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen	20	20	20	25	20	20	20	25	
			Tersedianya bahan-bahan promosi untuk pengembangan modal berupa studi/penelitian), Penyebaran informasi profil investasi	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal berupa : Temu Usaha/ Machmaking, Kebumen Business Forum, Penganugeraan Usaha Terbaik	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Tersedianya dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Terlaksananya pemantauan,	30	30	30	30	30	30	30	30	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
			pembinaan dan pengawasan penanaman modal terhadap perusahaan									
			Terlaksananya pameran investasi	4	4	4	4	4	4	4	4	
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan berupa pembinaan LKPM Online, klinik LKPM dan Task Force Penanaman Modal	20	20	20	20	20	20	20	20	
			Tersedianya informasi tentang energi dan Tersedianya informasi tentang sumber daya mineral	-	1	1	1	-	1	1	1	
	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri		Terlaksananya koordinasi pemantauan dan evaluasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO);	6	6	6	6	6	6	6	6	
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PATEN di Kecamatan;	26	26	26	26	26	26	26	26	
			Terlaksananya rapat koordinasi pembahasan dan verifikasi lapangan terkait dengan	900	950	1000	1050	900	950	1000	1050	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
			permohonan izin									
			Meningkatnya pelayanan perizinan;	11	11	11	11	11	11	11	11	
			Tercukupinya akurasi data perizinan	30	35	35	40	30	35	35	40	
	Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah		Terlayannya perizinan sesuai dengan SPP dan SOP	2875	2900	3000	3200	2875	2900	3000	3200	
	Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran		Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Terbayarnya listrik, air, telepon dan internet	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit)	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Terlaksananya jasa administrasi keuangan (orang)	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Tersedianya sarana kebersihan	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Terealisasinya perbaikan peralatan kerja	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Tersedianya alat tulis kantor (paket)	12	12	12	12	12	12	12	12	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
			Tersedianya barang cetakan & penggandaan (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Tersedianya komponen listrik (paket)	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Tersedianya bahan bacaan & peraturan Per- UU-an (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Tersedianya makan dan minum rapat (orang / kali)	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Tersedianya dana untuk perjalanan dinas keluar daerah (orang/kali)	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Tersedianya Pegawai Tidak Tetap	12	12	12	12	12	12	12	12	
			Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai		Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	5	1	0	0	5	1	0	
			Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1	2	5	1	1	2	5	1	
			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Tersedianya dokumen data perencanaan dan		Tersusunnya dokumen perencanaan : Renja,	6	6	6	6	6	6	6	6	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CAPAIAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	evaluasi pembangunan		Renstra, Lakip, LKPJ, LPPD, Rakor Pop/K, Monev dan laporan bulanan lain (dokumen)									
			Tersusunnya dokumen statistik Penanaman Modal dan Perijinan Usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	

Sumber : LKJIP DPMPTSP, 2017 (data diolah)

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa issue utama dalam pencapaian kinerja DPMPTSP adalah peningkatan kualitas perencanaan perangkat daerah. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana standar minimal kantor pelayanan;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pelayanan;
3. Melakukan evaluasi terhadap investasi yang masuk di Kabupaten Kebumen, apakah sudah sesuai target atau belum ;
4. Memperkuat tata kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu pelayanan secara efektif agar pelayanan dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi;
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan DPMPTSP serta kapasitas Sumber Daya Aparatur DPMPTSP.

2.4 REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan PD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
2. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016/2021;
3. Penyesuaian Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2016/2021.

Beberapa perubahan (penambahan) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Penetapan RPJPD, untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
2. Kegiatan Penetapan RPJMD, untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Renja Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
Kabupaten Kebumen

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi					Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi					
1	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	DPMPTSP	Meningkatnya penyebaran informasi dan penyediaan materi promosi investasi	0,06 %	365.500.000	Meningkatnya penyebaran informasi dan penyediaan materi promosi investasi	DPMPTSP	Meningkatnya penyebaran informasi dan penyediaan materi promosi investasi	0,06 %	365.500.000	
2	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	DPMPTSP	Meningkatnya kerjasama dunia usaha	0,03 %	227.500.000	Meningkatnya kerjasama dunia usaha	DPMPTSP	Meningkatnya kerjasama dunia usaha	0,03 %	227.500.000	
3	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	DPMPTSP	Tersedianya data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0,01 %	80.000.000	Tersedianya data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	DPMPTSP	Tersedianya data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0,01 %	80.000.000	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
4	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP	Peningkatan pengawasan penanaman modal	0,01 %	66.200.000	Peningkatan pengawasan penanaman modal	DPMPTSP	Peningkatan pengawasan penanaman modal	0,01 %	66.200.000	
5	Penyelenggaraan pameran investasi	DPMPTSP	Peningkatan Minat Investasi dan Promosi di Kabupaten Kebumen	0,06 %	340.778.000	Penyelenggaraan pameran investasi	DPMPTSP	Peningkatan Minat Investasi dan Promosi di Kabupaten Kebumen	0,06 %	340.778.000	
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	DPMPTSP	Peningkatan Pelaksanaan Task Force Penanaman Modal, Pelaksanaan pembinaan LKPM Online, Pelaksanaan Klinik LKPM	0,01 %	99.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	DPMPTSP	Peningkatan Pelaksanaan Task Force Penanaman Modal, Pelaksanaan pembinaan LKPM Online, Pelaksanaan Klinik LKPM	0,01 %	99.000.000	
7	Pemetaan potensi investasi daerah	DPMPTSP	Meningkatnya informasi tentang energi dan sumber daya mineral	1 %	83.610.000	Penyusunan Profil dan Pedoman Teknis Pengelolaan Sumber Daya Mineral	DPMPTSP	Meningkatnya informasi tentang energi dan sumber daya mineral	1 %	83.610.000	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri										
8	Peningkatan pelayanan perijinan bangunan dan lingkungan	DPMPTSP	Meningkatnya pelayanan perizinan;	0,2 %	169.000.000	Peningkatan pelayanan perijinan bangunan dan lingkungan	DPMPTSP	Meningkatnya pelayanan perizinan;	0,2 %	369.096.000	
9	Peningkatan pelayanan perijinan prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah	DPMPTSP	Meningkatnya pelayanan perizinan;	0,2 %	369.096.000	Peningkatan pelayanan perijinan prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah	DPMPTSP	Meningkatnya pelayanan perizinan;	0,2 %	369.096.000	
	Program pengembangan industri kecil dan menengah										
10	Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan	DPMPTSP	Peningkatan sosialisasi dan jemput bola pelayanan perizinan untuk peningkatan kinerja pelayanan perizinan	0,08%	65.000.000	Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan	DPMPTSP	Peningkatan sosialisasi dan jemput bola pelayanan perizinan untuk peningkatan kinerja pelayanan perizinan	0,08%	65.000.000	
11	Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	DPMPTSP	Peningkatan kemudahan pengusaha dan pengurusan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	1 %	140.800.000	Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	DPMPTSP	Peningkatan kemudahan pengusaha dan pengurusan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	1 %	140.800.000	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Program pengembangan data/informasi										
12	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	DPMPTSP	Tersusunnya Dokumen Statistik Penanaman Modal dan Perizinan	0,2 %	35.000.000	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	DPMPTSP	Tersusunnya Dokumen Statistik Penanaman Modal dan Perizinan	0,2 %	35.000.000	
13	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	DPMPTSP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RENSTRA, RENJA, LKJIP, LKPJ, dan LPPD, Evaluasi Renja Data Base DPMPTSP	0,1 %	44.500.000	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	DPMPTSP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RENSTRA, RENJA, LKJIP, LKPJ, dan LPPD, Evaluasi Renja Data Base DPMPTSP	0,1 %	44.500.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
14	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMPTSP	Tersedianya jasa surat menyurat	0,0006 %	3.227.000	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMPTSP	Tersedianya jasa surat menyurat	0,0006 %	3.227.000	
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPTSP	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber ,daya air, listrik untuk mendukung kelancaran kegiatan	0,03 %	146.938.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPTSP	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber ,daya air, listrik untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran	0,03 %	146.938.000	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
			perkantoran								
16	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	128.890.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMPTSP	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	128.890.000	
17	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMPTSP	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan demi kelancaran kegiatan Perkantoran	0,01 %	62.250.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMPTSP	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan demi kelancaran kegiatan Perkantoran	0,01 %	62.250.000	
18	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPTSP	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	110.075.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPTSP	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	110.075.000	
19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DPMPTSP	Terealisasinya perbaikan peralatan kerja demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,01 %	55.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DPMPTSP	Terealisasinya perbaikan peralatan kerja demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,01 %	55.000.000	
20	Penyediaan alat tulis kantor	DPMPTSP	Tersedianya Alat Tulis Kantor demi	0,009 %	47.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	DPMPTSP	Tersedianya Alat Tulis Kantor demi	0,009 %	47.000.000	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
			kelancaran kegiatan perkantoran					kelancaran kegiatan perkantoran			
21	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	90.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	90.000.000	
22	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP	Tersedianya Komponen Listrik demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,004 %	25.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP	Tersedianya Komponen Listrik demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,004 %	25.000.000	
23	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPTSP	Tersedianya Bahan Bacaan demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,001 %	7.800.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPTSP	Tersedianya Bahan Bacaan demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,001 %	7.800.000	
24	Penyediaan makanan dan minuman	DPMPTSP	Tersedianya Makan Minun Untuk Rapat dan Tamu demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,008 %	40.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	DPMPTSP	Tersedianya Makan Minun Untuk Rapat dan Tamu demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,008 %	40.000.000	
25	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Dana Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah demi	0,03 %	185.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Dana Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah demi kelancaran	0,03 %	185.000.000	

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
			kelancaran kegiatan perkantoran					kegiatan perkantoran			
26	Penunjang Administrasi Perkantoran	DPMPTSP	Tersedianya pegawai Tidak Tetap 1 orang	0,003 %	18.500.000	Penunjang Administrasi Perkantoran	DPMPTSP	Tersedianya pegawai Tidak Tetap 1 orang	0,003 %	18.500.000	
27	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Perjalan Dinas Dalam Daerah demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,005 %	26.620.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Perjalan Dinas Dalam Daerah demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,005 %	26.620.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	DPMPTSP	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	12 %	312.850.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	DPMPTSP	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	12 %	312.850.000	
29	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP	Peningkatanfungsi gedung kantor	0,06 %	125.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP	Peningkatanfungsi gedung kantor	0,06 %	125.000.000	

Sumber : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program/Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis). Tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Tidak ada usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja DPMPTSP tahun 2019.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, isu strategis Perencanaan Pembangunan antara lain :

1. meningkatkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra dan Renja K/L) maupun pemerintahan daerah (RPJMD/RKPD).
2. menyiapkan rancang bangun pembangunan nasional, antara lain melalui pemberdayaan Biro Perencanaan K/L
3. menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih menekankan kepada result oriented.
5. memperkuat tata kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu perencanaan dan pengendalian secara efektif agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi.
6. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengendalian perencanaan (e-planning) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (e-monev) serta diharapkan akan menjadi basis e-budgeting yang dapat diterapkan paling lambat pada TA 2018/2019. Dengan pengembangan system ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.
7. melakukan reformasi hukum, terutama dalam konteks deregulasi yang luas (wide-range deregulation) dengan target mengurangi 50 % regulasi pada semua tingkatan yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini diharapkan juga dapat memastikan agar pembentukan peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyempurnaan kedua Peraturan Pemerintah diperlukan untuk mensinergikan perencanaan dan penganggaran yang akan bermanfaat untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
8. mengoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan kerjasama pembangunan internasional yang lebih

aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral dengan terms and conditions yang lebih sehat.

Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, antara lain :

1. meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan: (i) memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan setiap tahapan proses perencanaan sehingga dapat secara terus menerus meningkatkan kualitas (continous improvement); dan (ii) mempertajam perumusan indicator pembangunan yang ditetapkan.
2. memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data (evidence based information) yang antara lain dengan: (i) meningkatkan kualitas kajian-kajian pembangunan yang terintegrasi antarfungsi dan antarwilayah, perencanaan berbasis bukti dan data dapat terus didorong; (ii) mengembangkan Knowledge Management System (Sistem Manajemen Pengetahuan) diperlukan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan proses perencanaan; dan (iii) membangun database pembangunan yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua sektor dengan mudah (user friendly).
3. Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran sehingga SDM Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya memiliki kapasitas substantif dalam kebijakan sektor tertentu, namun juga memiliki kapasitas yang bersifat lebih teknis dalam ranah perencanaan, penganggaran, menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, dan membangun hubungan kerja efektif dengan mitra K/L dan daerah.
4. memetakan kapasitas SDM sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan SDM Kementerian PPN/Bappenas untuk menentukan jenjang karir serta opsi pengembangan diri secara akademis, dalam rangka mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai sebuah organisasi.
5. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses perencanaan yang antara lain dengan: (i) memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional; (ii) sinkronisasi perencanaan dengan pemangku kepentingan lainnya yaitu lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, lembaga think tank, lembaga pemerhati lingkungan, perguruan tinggi, swasta, asosiasi pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya; (iii) penguatan isu lintas bidang dan sinkronisasi pembangunan lintas sector dan wilayah, dengan penguatan koordinasi dan regulasi; dan (iv) memperkuat kerjasama pembangunan internasional dalam kerangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
6. Memperkuat sistem data dan informasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan, dengan: (i) membangun integrasi dan sinkronisasi sistem data dan informasi antarfungsi pembangunan dan antarwilayah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah);

- dan (ii) mengembangkan sistem updating data dan informasi yang terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
7. Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran dengan mereviu alokasi anggaran baseline dan memastikan sasaran dan indikator rencana menjadi acuan dalam alokasi anggaran untuk optimalisasi pemanfaatan alokasi sumber daya, melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
 8. melakukan sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan, melalui: (i) analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan antarfungsi pemerintah dan antarwilayah; (ii) harmonisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; dan (iii) memperkuat kapasitas perencana dalam melakukan reviu kerangka kebijakan dan kelembagaan antarfungsi dan antarwilayah.
 9. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya melalui continuous improvement dalam setiap proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan komitmen para pimpinan untuk merubah management silo dalam proses perencanaan, dan peningkatan fungsi dan kompetensi agen perubahan.
 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah dengan mekanisme: pendidikan, pelatihan, dan bimbingan penyusunan perencanaan pusat dan daerah yang sinergis dengan perencanaan nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019, tema pembangunan tahun 2019 adalah “Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian Bagi Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat”. Prioritas pembangunan tahun 2019 antara lain :

1. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung oleh pembangunan pertanian dan pariwisata;
2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Peningkatan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas; dan
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kondusivitas wilayah.

DPMPTSP Kabupaten Kebumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di DPMPTSP mendukung prioritas ke-5 (penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kondusivitas wilayah).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan DPMPTSP, tujuan dan sasaran rencana kerja DPMPTSP tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019
1.	Meningkatkan daya saing investasi	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Nilai Investasi PMA/PMDN	340.658.000.000

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja DPMPTSP tahun 2019 mencakup 6 program yang terdiri dari 29 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - a. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
 - b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
 - c. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
 - d. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
 - e. Penyelenggaraan pameran investasi
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri
 - a. Peningkatan pelayanan perijinan bangunan dan lingkungan
 - b. Peningkatan pelayanan perijinan prinsip dan Pemakaian Kekayaan
3. Program Pengembangan Industri kecil dan menengah
 - a. Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan
 - b. Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- k. Penyediaan makanan dan minuman
- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- m. Penunjang administrasi perkantoran
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 6. Program Pengembangan data/Informasi
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V

PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya *benefit* yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga *cost* atau biayanya.

Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2019. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari DPMPTSP, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DPMPTSP Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi DPMPTSP serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan DPMPTSP tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati DPMPTSP Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder DPMPTSP.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (P1)
Tahun Anggaran 2019
Dinas Penanaman Modal

Nomor	Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	Prioritas Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.16.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										3.470.134.000	4.109.470.000			
2.1.16.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										1.262.588.000	1.506.120.000			
2.12.1.16.01	Penanaman Modal										1.262.588.000	1.506.120.000			
2.12.1.16.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	230.000.000.00 0					1.262.588.000	1.506.120.000			
2.12.1.16.01.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Peningkatan Daya Saing Daerah didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Dinas PM dan PTSP			Tersedianya data dan informasi potensi peluang investasi	2 Dokumen	Meningkatnya penyebarluasan informasi dan penyediaan materi promosi investasi	0,06 %	365.500.000	415.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
2.12.1.16.01.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Peningkatan Daya Saing Daerah didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPPTSP Kabupaten KEbumen			Terselenggaranya Anugerah Usaha Terbaik, Kebumen Bisnis Forum, Temu Usaha	3 Kegiatan	Meningkatnya kerjasama dunia usaha	0,03 %	227.500.000	294.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
2.12.1.16.01.15.07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPPTSP Kabupaten Kebumen			Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	Tersedianya data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0,01 %	80.000.000	88.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1

2.12.1.16.01.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terlaksananya kegiatan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	30 penanam modal	Peningkatan pengawasan penanaman modal	0,01 %	66.200.000	72.820.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
2.12.1.16.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terlaksananya Pameran Investasi	4 Kali	Peningkatan Minat Investasi dan Promosi di Kabupaten Kebumen	0,06 %	340.778.000	442.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
2.12.1.16.01.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terciptanya kegiatan penanaman modal sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku	20 penanam modal	Peningkatan Pelaksanaan Task Force Penanaman Modal, Pelaksanaan pembinaan LKPM Online, Pelaksanaan Klinik LKPM	0,01 %	99.000.000	108.900.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
2.12.1.16.01.15.12	Pemetaan potensi investasi daerah	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Tersedianya informasi tentang energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	Meningkatnya informasi tentang energi dan sumber daya mineral	1 %	83.610.000	84.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KB	P1
3.1.16.01	Urusan Pilihan										743.896.000	1.073.763.000			
3.06.1.16.01	Perdagangan										538.096.000	848.883.000			
3.06.1.16.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				Meningkatkan Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan perdagangan dalam negeri	82,00					538.096.000	848.883.000			
3.06.1.16.01.18.15	Peningkatan pelayanan perijinan bangunan dan lingkungan	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terlaksananya pelayanan Perizinan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Kebumen	400 Dokumen	Peningkatan pelayanan Perizinan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Kebumen	0,06 %	169.000.000	218.900.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KB	P1

3.06.1.16.01.18.16	Peningkatan pelayanan perijinan prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMP TSP Kabupaten Kebumen			Terlaksananya pelayanan pendaftaran investasi dan perizinan kekayaan daerah	165 Dokumen	Meningkatnya pelayanan perizinan;	0,2 %	369.096.000	629.983.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KB	P1
3.07.1.16.01	Perindustrian										205.800.000	224.880.000			
3.07.1.16.01.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				Meningkatkan kemudahan izin usaha kecil dan menengah	20,23					205.800.000	224.880.000			
3.07.1.16.01.16.12	Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan	Peningkatan Daya Saing Daerah didukung dengan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMP TSP Kabupaten Kebumen			Terselenggaranya sosialisasi dan jemput bola pelayanan perizinan SIUP dan TDP	4 Kegiatan	Peningkatan sosialisasi dan jemput bola pelayanan perizinan untuk peningkatan kinerja pelayanan perizinan	0,08 %	65.000.000	70.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KB	P1
3.07.1.16.01.16.13	Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah didukung oleh Pembangunan Pertanian dan Pariwisata	Meningkatnya daya saing investasi daerah	DPMP TSP Kabupaten Kebumen			Terlaksananya kemudahan pengusaha dan pengurusan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	600 Dokumen	Peningkatan kemudahan pengusaha dan pengurusan perizinan kesehatan, komunikasi, dan ketenagakerjaan	1 %	140.800.000	154.880.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KB	P1
4.1.16.01	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										79.500.000	130.000.000			
4.01.1.16.01	Perencanaan Pembangunan										79.500.000	130.000.000			
4.01.1.16.01.15	Program pengembangan data/informasi				Meningkatkan program pengembangan data/informasi	15%					79.500.000	130.000.000			
4.01.1.16.01.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMP TSP Kabupaten Kebumen			Tersusunnya Dokumen Statistik Penanaman Modal dan Perizinan	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Statistik Penanaman Modal dan Perizinan	0,2 %	35.000.000	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
4.01.1.16.01.15.02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMP TSP Kabupaten Kebumen			Tersusunnya Dokumen Perencanaan RENSTRA, RENJA, LKJIP, LKPJ, dan LPPD, Evaluasi Renja Data Base DPMP TSP	6 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RENSTRA, RENJA, LKJIP, LKPJ, dan LPPD, Evaluasi Renja Data Base DPMP TSP	0,1 %	44.500.000	75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.1.16.01	Program Pendukung Operasional SKPD										1.384.150.000	1.399.587.000			
5.01.1.16.01	Program Pendukung Operasional SKPD										1.384.150.000	1.399.587.000			

5.01.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	15%					946.300.000	1.032.087.000			
5.01.1.16.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	Tersedianya jasa surat menyurat	0,0006 %	3.227.000	3.660.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terpenuhinya jasa komunikasi sumber ,daya air, listrik	12 Bulan	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber ,daya air, listrik untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran	0,03 %	146.938.000	161.632.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	128.890.000	132.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan demi kelancaran kegiatan Perkantoran	0,01 %	62.250.000	69.300.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	110.075.000	121.083.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terealisasinya perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Terealisasinya perbaikan peralatan kerja demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,01 %	55.000.000	60.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,009 %	47.000.000	51.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1

5.01.1.16.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,02 %	90.000.000	99.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Tersedianya Komponen Listrik	12 Bulan	Tersedianya Komponen Listrik demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,004 %	25.000.000	27.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,001 %	7.800.000	8.580.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Tersedianya Makan Minun Untuk Rapat dan Tamu	12 Bulan	Tersedianya Makan Minun Untuk Rapat dan Tamu demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,008 %	40.000.000	44.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten Kebumen			Terlaksananya Dana Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	Terlaksananya Dana Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,03 %	185.000.000	203.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten KEbumen			Tersedianya pegawai Tidak Tetap 1 orang	12 Bulan	Tersedianya pegawai Tidak Tetap 1 orang	0,003 %	18.500.000	20.350.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMPTSP Kabupaten KEbumen			Terlaksananya Perjalan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan	Terlaksananya Perjalan Dinas Dalam Daerah demi kelancaran kegiatan perkantoran	0,005 %	26.620.000	29.282.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KSB	P1
5.01.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					437.850.000	367.500.000			

5.01.1.16.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DINAS PENANAMAN MODAL,			Tersedanya peralatan gedung kantor kursi rapat, kursi tamu/sofa, korden, Server Siperi, PC,Laptop 2, Printer, Scanner duduk,LCD	8 Paket	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	12 %	312.850.000	230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KB	P1
5.01.1.16.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kondusivitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	DPMP TSP Kabupaten Kebumen			Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Unit	Peningkatan fungsi gedung kantor	0,06 %	125.000.000	137.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KB	P1

NO	VERIFIKATOR	TTD
1		
2		
3		

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. H. HERY SETYANTO
Pembina Utama Muda
NIP 19601023 199001 1 001